



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

DAFTAR PUSTAKA

- Etwiory, Endang Beselina. 2014. "Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah". *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*. Vol. 1, No. 2, 2014, Artikel 5.
- F, Fahirah, Armin Basong, dan Hermansah H. Talaga. 2010. "Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Jual Lahan dan Bangunan Pada Perumahan Tipe Sederhana". *Jurnal Smartek*. Vol. 8, No. 4, November 2010, Hal. 251-269.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Edisi 6. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanudin, Mohamad. 2011. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota Semarang Tahun 2001-2008". *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Semarang*. Vol. 6, No. 1, April 2011, Hal 24-30.
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2012. *Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Imbing, Ovelia Veradina. 2013. "Analisis Penetapan NJOP Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan PBB di Kota Manado". *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 3, Juni 2013, Hal. 484-493.
- Kairupan, Siesti Pristina. "Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012". *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 4, Desember 2013, Hal 2206-2216.
- Lind, Douglas A., William G. Marchal., dan Samuel A. Wathen. 2012. *Statistical Techniques in Business and Economics Fifteenth Edition*. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Makmur. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PBB - Pajak Bumi dan Bangunan - Di Kabupaten Kutai Barat". *Jurnal Eksis*. Vol. 6, No. 2, Agustus 2010, Hal 1591-159.

- Mukhlis, Imam. 2010. "Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah".
- Novie dan Amelia Sandra. 2012. " Analisis Tingkat Akurasi Penetapan NJOP Tanah Terhadap Nilai Pasar Dengan Metode *Assessment Sales Ratio* (Studi Kasus di Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara)".
- Sasana, Hadi. 2005. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)". *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 2, No. 1, Juli 2005, Hal 19-29.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 5th edition. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Taluke, Maxwel. 2013. "Analisis Kontribusi Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Halmahera Barat". *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 3, September 2013, Hal. 385-393.
- Tarigan, Kharisma Wanta. 2013. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Kota Manado". *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 3, Juni 2013, Hal. 282-291.
- Trigiant, Jefry, Ethika, dan Dandes Rifa. 2014. " Kajian Empiris tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang". *E-Journal Universitas Bung Hatta*. Vol. 5, No. 1, 2014.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perpajakan

- Pemerintah Daerah Kota Tangerang. 2010. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Tangerang: Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
- Pemerintah Daerah Kota Tangerang. 2012. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Tangerang: Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 ayat (1), Struktur APBD. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 1994. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 40 dan Pasal 41. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2014. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2). Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Website

Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya. <http://www.pajak.go.id> (Diakses pada: 1 Maret 2014).

Pengertian Inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK).
http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&id_subyek=03. (Diakses pada: 5 Maret 2014).

Pengertian Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> (Diakses pada: 18 Maret 2014).

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
<http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb> (Diakses pada: 19 Maret 2014).

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/sistem-pemerintahan-daerah.html>
(Diakses pada: 18 Maret 2014).

Susunan dan Kegunaan Nomor Objek Pajak (NOP).
<http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=582> (Diakses pada: 19 Maret 2014).

Tujuan dari Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sesuai Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). <http://www.pajak.go.id>
(Diakses pada: 1 Maret 2014).

UMMN